

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menguraikan tentang pemberdayaan Babinsa di tengah masyarakat dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah aksi radikalisme yang tercermin dalam gerakan terorisme, ekstremisme, dan fundamentalisme. Babinsa sebagai ujung tombak TNI AD di tengah masyarakat desa / kelurahan harus diberdayakan dari aspek personil, anggaran, sarana prasarana, dan metode / piranti lunak. Hal ini penting dilakukan agar supaya Babinsa mampu melaksanakan tugas pokok untuk mencegah aksi radikalisme sehingga membantu TNI AD dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman.

Kata kunci : Pemberdayaan, Babinsa, Radikalisme.

ABSTRACT

This paper wants to elaborate on the empowerment of rural NCO builder in the community in detecting, identifying, and preventing radicalism reflected in the movement of terrorism, extremism and fundamentalism. NCO village builder as the spearhead of the military in the middle of the village should be empowered from the aspect of personnel, budget, facilities, and methods / software. This is important in order to NCO village builder is able to perform basic tasks to prevent radicalism that helps maintain the integrity of the military in Indonesia from various threats.

Keyword: Empowerment, non- commissioned officers village, Radicalism.

Pendahuluan

Dinamika keamanan global saat ini tengah mengalami transformasi dari ancaman keamanan tradisional menuju pada keamanan non tradisional yang tercermin dari munculnya berbagai aksi radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme yang dikenal dengan gerakan terorisme di berbagai belahan dunia.¹

Maraknya aksi terorisme di berbagai negara, khususnya yang saat ini terjadi di negara-negara Eropa Barat, yang dibuktikan dengan adanya serangan dan teror Paris dan Brussel, yang disinyalir dilakukan oleh ISIS, telah menaikkan peringkat terorisme sebagai ancaman nomor wahid di dunia. Ancaman terorisme, khususnya ISIS, menjadi skala prioritas untuk ditangani secara cepat, tepat dan integral. Setiap negara di

dunia berupaya bahu membahu untuk mencegah dan menangkal aksi dan gerakan terorisme yang membahayakan keamanan negaranya masing-masing.

Di Indonesia, aksi radikalisme sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman perjuangan kemerdekaan. Secara historis, aksi radikalisme telah muncul dan menguat sejak adanya gerakan DI/TII yang kemudian bermetamorfosa dalam berbagai pemikiran, aksi dan gerakan terorisme, seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan saat ini terpecah pada Majelis Indonesia Barat (MIB) dan Majelis Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santosa alias Abu Wardah yang terpusat di Taman Jeka, Pegunungan Biru, Poso, Sulawesi Tengah.

Semua organisasi teroris yang ada di Indonesia memiliki keterkaitan dengan

¹ Agus Subagyo, Terorisme Global Abad 21, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015, hal. 12

organisasi teroris dunia, seperti Al Qaeda dan saat ini adalah ISIS. Sel-sel ISIS di Indonesia sangat banyak sekali dan bahkan mereka telah mem-baiat sebagai pengikut dan pendukung ISIS di Asia Tenggara dan Indonesia². Hal ini terjadi karena mereka banyak yang merupakan alumni dari ISIS atau paling tidak mereka telah mendapatkan pelatihan ISIS di Suriah dan Irak. Berdasarkan informasi dari BIN, sampai dengan tahun 2016 ini telah terdapat 800 orang berangkat ke Suriah untuk melakukan peperangan maupun mendapatkan pelatihan perang, untuk kemudian kembali ke Indonesia dalam rangka membangun sel-sel ISIS di bumi pertiwi.

Aksi dan gerakan sel-sel ISIS selalu berada di bawah tanah alias klendestein yang bergerak di tengah masyarakat, khususnya di desa maupun kelurahan. Mereka memanfaatkan kelengahan masyarakat untuk melakukan perekutan, pelatihan maupun cuci otak atau “brain washing” di tengah masyarakat sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dideteksi. Banyak sekali masyarakat yang kurang kuat iman dan pendiriannya kemudian terbawa dalam pengaruh dan doktrin radikalisme sehingga membahayakan masa depan bangsa karena rata-rata pihak yang terkena korban rekrutan ISIS adalah anak muda, kalangan pemuda, dan generasi muda yang berumur antara 17 tahun sampai dengan 30 tahun.

Target ISIS di Indonesia adalah ingin mendirikan Negara Islam Indonesia Malaysia dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi radikal yang mereka yakini dan mereka anut³. Data statistik menunjukkan bahwa aksi serangan teror di Indonesia telah terjadi puluhan kali dengan menyasar banyak sekali obyek vital

nasional dan internasional. Aksi radikalisme dan terorisme telah mengalami perubahan sasaran, dimana jika dahulu banyak menyasar pada sasaran simbol-simbol Barat, maka sekarang ini mengalami perluasan sasaran tidak hanya sasaran Barat, namun telah meluas pada sasaran kepada Polisi, TNI maupun obyek nasional yang dianggap oleh mereka berafiliasi dengan kepentingan Barat.

Aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat sangat cepat mengingat masyarakat Indonesia memiliki budaya ketimuran yang santun dan ramah terhadap pendatang asing, kultur memandang semua orang baik, dan permisif terhadap hal-hal baru. Ditambah lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif miskin, banyak pengangguran dan kesulitan ekonomi dan ketimpangan sosial, sehingga aksi radikalisme mudah masuk dan menyusup di hati sanubari masyarakat, dengan cara mengontrak rumah, melakukan kegiatan keagamaan sebagai kedok, dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat sebagai pelindung diri dan membangun ikatan emosional kekerabatan.

Dalam konteks inilah, peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) sebagai organisasi territorial TNI AD yang paling bawah, berada di desa / kelurahan, menempati posisi yang sangat strategis. Babinsa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai alat identifikasi, deteksi, dan cegah dini terhadap berbagai aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat. Babinsa dirancang oleh TNI AD sebagai “mata” dan “telinga” di tengah masyarakat untuk menyerap, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan berbagai informasi, data dan fakta untuk bahan pertimbangan TNI AD dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat sebenarnya dapat dideteksi, dicegah dan ditangkal secara dini oleh Babinsa yang

² Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, Bandung : Penerbit Alfabet, 2016, hal. 29

³ Ramses Salomoa, *Kebijakan Indonesia Dalam Mencegah Pergerakan ISIS*, Tesis, Cimahi : MIP FISIP Unjani, 2015, hal. 58

setiap harinya berada di tengah masyarakat⁴. Babinsa mengenal masyarakat karena berada di tengah masyarakat dan membaur dalam aktifitas masyarakat yang dengan mudah dan cepat mendeteksi aksi perekrutan, cuci otak maupun pelatihan perang yang dilakukan oleh ISIS maupun sel-sel nya di tengah masyarakat Indonesia. Babinsa merupakan komponen yang sangat strategis, berada di paling depan, dan ujung tombak dalam identifikasi dini, deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Namun demikian, Babinsa yang menempati posisi strategis tersebut mengalami banyak sekali kendala, hambatan dan permasalahan, khususnya keterbatasan personil, anggaran, sarana prasarana, dan piranti lunak / metode. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan Babinsa agar lebih berdaya untuk mencegah aksi radikalisme di setiap desa / kelurahan di seluruh Indonesia. Babinsa harus terus diberi daya dan diberdayakan baik kompetensi, kapabilitas dan kapasitasnya agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

Pembahasan.

1. Babinsa : Ujung Tombak Deteksi Dini

Dalam organisasi TNI AD, dikenal yang namanya aparat komando territorial yang terdiri dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa. Babinsa umumnya berada di wilayah desa / kelurahan⁵. Babinsa merupakan Bintara Pembina Desa yang kadangkala memang 1 Babinsa wilayah penugasannya ada di beberapa desa / kelurahan, karena keterbatasan kuantitas personil Babinsa. Idealnya memang 1 Babinsa

bertugas di 1 desa / kelurahan sehingga dapat optimal melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat.

Babinsa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Babinsa memiliki posisi strategis berada di tengah masyarakat dan sehari-hari bersama masyarakat. Babinsa diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa / kelurahan. Babinsa diharapkan dapat melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap berbagai permasalahan dan persoalan pertahanan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat.

Babinsa merupakan aparat kewilayahan TNI AD yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat, berinteraksi dengan semua komponen masyarakat, dan berhubungan dengan semua *stakeholders* di tengah masyarakat, sehingga memiliki peran, posisi, dan signifikansi yang sangat strategis bagi keberhasilan tugas TNI AD. Babinsa merupakan “mata” dan “telinga” bagi TNI AD dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai informasi, fakta, dan data yang terjadi di tengah masyarakat.

Babinsa bertugas untuk sarana pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap berbagai aspek ipoleksosbudhankam yang berkembang di tengah masyarakat masing-masing, untuk kemudian dipilih, diolah, dianalisis, dan disajikan secara sistematis untuk kemudian dilaporkan secara cepat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. Dalam konteks pencegahan aksi radikalisme, Babinsa menempati posisi yang sangat vital, untuk mendeteksi, mencegah, dan menangkal berbagai kegiatan, aksi maupun gerakan radikalisme yang berbasis baik kepada

⁴ Agus Subagyo, *Bela Negara : Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hal. 31

⁵ Suwarno Sutikno, *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2011, hal. 10



radikalisme agama maupun radikalisme etnik⁶. Babinsa dirancang untuk mensosialisasikan dan menerapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling), pos keamanan lingkungan (poskamling), ronda keliling, dan sistem “tamu wajib lapor” kepada ketua RT setempat bagi pendatang asing yang bertemu dan menginap 1 X 24 jam.

Babinsa juga didesain menjadi ujung tombak dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, maupun berbagai pimpinan Ormas, LSM, dan pondok pesantren yang ada di tengah masyarakat dalam rangka program deradikalisasi⁷. Babinsa yang ada di tengah masyarakat menjadi sumber bertanya bagi masyarakat tentang aspek keamanan, pertahanan dan beragam permasalahan kamtibmas di tengah masyarakat.

2. Permasalahan Yang Dihadapi Babinsa

Babinsa yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan di Indonesia tentunya menghadapi berbagai permasalahan dalam mendeteksi, mencegah, menangkal, dan menangani aksi radikalisme di tengah masyarakat. Berikut ini akan diuraikan kendala / permasalahan apa saja

yang dihadapi Babinsa, antara lain :

- Sumber Daya Manusia.

Dari aspek kuantitas, jumlah Babinsa di Indonesia memang relatif banyak yang tersebar di semua desa dan kelurahan di Indonesia. Namun demikian, dihadapkan pada luas wilayah dan kompleksitas topografi Indonesia, maka jumlah Babinsa yang dimiliki oleh TNI AD masih relatif sedikit. Sebagai gambaran, 1 Babinsa kadangkala harus meng-cover 2 sampai 3 Desa / Kelurahan sehingga membuat kinerja personil Babinsa menjadi kurang optimal. Ditambah lagi dengan pluralitas permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat yang sangat majemuk, sehingga memengaruhi pelaksanaan tugas personel Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme.

Dari aspek kualitas, personel Babinsa masih menghadapi permasalahan kompetensi, yang terlihat dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap/perilaku (*attitudes*). Ditinjau dari aspek pengetahuan, tidak semua personel Babinsa memiliki tingkat pendidikan formal yang memadai, rata-rata lulusan SMA/SMU, dan masih jarang yang tingkat pendidikannya strata 1 (S1). Ditinjau dari aspek keterampilan / keahlian, belum semua personel Babinsa mampu menguasai kemampuan bahasa lokal dari tempat bertugasnya, masih

⁶ Herman Sasongko, *Peran Babinsa Dalam Menanggulangi Terorisme*, Tesis, Bogor : Unhan, 2014, hal. 23

⁷ Suranto, *Program Deradikalisasi Demi NKRI*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hal. 71

lemah penguasaan adat istiadat masyarakat dan masih kurang optimal dalam memahami budaya, karakter masyarakat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ditinjau dari aspek mentalitas / sikap / perilaku, masih ada personil Babinsa yang kurang merakyat, kurang dikenal masyarakat, dan kurang bersikap arogan alias mentang-mentang sebagai anggota TNI AD.

Dari gambaran aspek kualitas personil Babinsa tersebut, dapat dinyatakan bahwa lemahnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, dan sikap / perilaku yang kurang mencerminkan saptamarga dan sumpah prajurit, tentunya mempengaruhi pelaksanaan tugas personil Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme di tengah masyarakat. Sebagian kecil personil Babinsa menjadi kurang tanggap, kurang waspada, dan kurang membaur dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah aksi radikalisme yang berada di tengah masyarakat.

- Anggaran.

Alokasi anggaran untuk personil Babinsa sampai dengan saat ini masih sangat minim sebagai konsekuensi dari alokasi anggaran pertahanan negara yang masih rendah, sehingga mempengaruhi alokasi anggaran untuk operasional Babinsa. Padahal, dukungan anggaran yang besar dan memadai merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk personil Babinsa cukup besar, baik dukungan anggaran operasional dan anggaran rutin, khususnya uang saku, uang transportasi, uang makan, dan uang komunikasi / koordinasi. Selama ini, personil Babinsa dituntut untuk turun ke kampung-kampung atau dusun-dusun, sambang desa, sambung kampung, dan sambang dusun untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan semua tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Semua itu tentunya memerlukan anggaran untuk makan, bensin, pulsa, dan lain-lain.

- Sarana Prasarana.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh personil Babinsa masih kurang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok personil Babinsa dalam mendeteksi dan mencegah aksi radikalisme di tengah masyarakat. Sarana prasarana berupa peralatan komunikasi, peralatan transportasi, fasilitas kantor Babinsa, dan peralatan pendukung lainnya masih sangat minim sehingga berpengaruh terhadap kinerja personil Babinsa. Sebagai gambaran, belum semua personil Babinsa yang ditempatkan di desa atau kelurahan, didukung dengan kendaraan bermotor roda 2, yang sebenarnya sangat penting untuk mendukung mobilitas dan manuver personil Babinsa dalam melakukan kunjungan, silaturahmi, dan safari ke ormas, LSM maupun berbagai organisasi keagamaan lainnya, termasuk pesantren, masjid, dan menghadiri pengajian keagamaan lainnya, untuk mendeteksi benih-benih pemikiran radikalisme.

Belum lagi dukungan peralatan komunikasi berupa HT atau HP yang sangat penting bagi personil Babinsa untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik komunikasi kepada atasan maupun komunikasi kepada warga masyarakat. Belum semua personil Babinsa diberikan HP atau HT untuk mendukung tugasnya di tengah masyarakat, sehingga selama ini komunikasi menggunakan HP pribadi dengan uang pulsa secara pribadi. Padahal, peralatan komunikasi sangat penting untuk mendukung tugas lapor cepat dan temu cepat dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.

- Metode.

Pelaksanaan metode / sistem yang diterapkan oleh

personil Babinsa masih kurang efektif dan efisien. Selama ini, belum semua masyarakat mengetahui siapa personil Babinsa yang ada di desa / kelurahannya masing-masing. Masyarakat desa / kelurahan belum tahu siapa nama Babinsanya, bertempat tinggal dimana, berapa nomor HP nya, melalui cara apa bisa ditemui, dan untuk apa saja menemui Babinsa.

Artinya, sistem dan metode sosialisasi harus dilakukan oleh Babinsa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Babinsa di desa / kelurahan, berikut manfaat, arti penting, dan nilai strategis Babinsa bagi keamanan lingkungannya masing-masing. Perlu ada mekanisme anev atau monev terhadap kinerja personil Babinsa, berupa mekanisme pemberian buku saku, buku harian, log book, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemberlakuan *reward* dan *punishment* secara transparan, profesional, akuntabel, bersih dan jujur.

3. Pemberdayaan Babinsa

Mengingat begitu pentingnya posisi, signifikansi dan peran Babinsa dalam mencegah aksi radikalisme di tengah masyarakat yang marak belakangan ini, khususnya dipicu oleh munculnya gerakan ISIS⁸, maka diperlukan pemberdayaan Babinsa untuk meningkatkan kapasitas, kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi Babinsa sehingga akan mencapai target kinerja maupun capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Pemberdayaan Babinsa harus berpegang teguh pada aspek sumber daya organisasi, berupa aspek personil, anggaran, sarana prasarana, dan metode, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Personil

Ditinjau dari aspek kuantitas personil, pemberdayaan Babinsa dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah personil Babinsa di setiap

desa / kelurahan di seluruh Indonesia. Diperlukan penambahan jumlah Babinsa sehingga akan memenuhi rasio ideal, yakni : 1 desa / kelurahan : 1 Babinsa, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Babinsa dalam mendekripsi dan mencegah aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Ditinjau dari aspek kualitas personil, pemberdayaan Babinsa dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan personil Babinsa, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan Babinsa secara rutin oleh Dandim dan Danramil sehingga dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan deteksi dini, cegah dini, komunikasi sosial, maupun pemahaman ajaran agama, aliran kepercayaan, dan deradikalisasi.

Selain itu, diperlukan pemberdayaan Babinsa dari aspek keterampilan dan keahlian, baik keterampilan berbahasa lokal, bahasa daerah, pemahaman nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, hukum adat, maupun dinamika sosial di tengah masyarakat tempat Babinsa ditugaskan. Harapannya, agar supaya Babinsa lebih cepat beradaptasi, fleksibel, dan akomodatif, maka hendaknya penempatan personil Babinsa menerapkan prinsip : "the local boy for the local job". Artinya, personil Babinsa yang ditugaskan di desa / kelurahan seyogyanya berasal dari daerah yang bersangkutan, sehingga dapat memudahkan komunikasi sosial dan memiliki ikatan psikologis dengan masyarakat setempat.

Ditambah lagi dengan pemberdayaan Babinsa terhadap aspek sikap / perilaku / moralitas / mentalitas, yang hendaknya selalu dijaga dan dipelihara oleh setiap Babinsa⁹. Meskipun Babinsa berada di tengah masyarakat setiap harinya, namun Babinsa adalah personil TNI AD yang harus tetap memegang teguh sapta marga dan

⁸ Sumarjo Sukito, *ISIS : Sejarah, Aksi dan Deradikalisasi*, Jurnal Jipolis FISIP Unjani, Vol VI, No. 2 Tahun 2015, hal. 9

⁹ Yoki Naura, *Sistem dan Kebijakan Babinsa Di Era Reformasi*, Tesis, Bogor : Unhan, 2014, hal. 28

sumpah prajurit, menjaga sikap, perilaku, dan perbuatan yang profesional, transparan, terpuji dan bermoral. Babinsa harus mampu menjadi teladan dan “role model” bagi masyarakat sehingga masyarakat akan dengan senang dan nyaman untuk aktif dan interaktif melaporkan berbagai gejala radikalisme di wilayahnya masing-masing.

- **Anggaran**

Alokasi anggaran rutin dan anggaran operasional untuk Babinsa harus ditingkatkan sebagai bagian dari program pemberdayaan Babinsa untuk mendeteksi, mencegah dan menindak aksi radikalisme di tengah masyarakat. Anggaran operasional dan anggaran rutin harus terpenuhi dengan baik sehingga Babinsa memiliki kekuatan, kapasitas, dan mobilitas tinggi dalam mencegah dan menangkal aksi radikalisme di setiap desa / keluarahan.

Sudah selayaknya dibuat kebijakan standart tentang indeks uang makan, uang saku, uang komunikasi, dan uang transportasi guna mendukung Babinsa setiap harinya di tengah masyarakat. Babinsa harus didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga mereka akan melakukan tugasnya dengan baik di tengah masyarakat. Babinsa bisa fokus bekerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan konsisten. Tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai maka Babinsa tidak akan bekerja secara optimal di tengah masyarakat desa dan kelurahan.

- **Sarana Prasarana**

Sarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung sangat penting bagi Babinsa untuk melaksanakan tugas pokok di tengah masyarakat dalam mendeteksi aksi radikalisme. Babinsa harus dilengkapi dengan peralatan transportasi berupa kendaraan bermotor roda dua untuk melakukan sambang desa dan memudahkan

manuver dan mobilitas mendatangi tokoh agama maupun tokoh masyarakat lainnya. Peralatan komunikasi berupa HT maupun HP harus pula dimiliki oleh Babinsa dan penting dipenuhi oleh TNI AD agar supaya Babinsa dapat melaporkan secara cepat setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat.

Peralatan kantor, berupa ATK, markas Babinsa di desa / keluarahan dan segala kebutuhan logistik lainnya harus dimiliki oleh Babinsa. Selama ini, Babinsa masih menumpang kantornya di balai desa dan bersandar pada Kepala Desa. Babinsa harus dipenuhi peralatan, fasilitas, dan logistik yang memadai sehingga akan mendukung kinerja Babinsa dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal aksi terorisme di tengah masyarakat.

- **Metode**

Sistem dan metode kerja Babinsa di tengah masyarakat merupakan sebuah keharusan agar supaya Babinsa melaksanakan tugas pokok secara benar, profesional dan modern¹⁰. Babinsa harus mampu diberikan pedoman, petunjuk dan arahan agar supaya bekerja secara maksimal dan optimal di tengah masyarakat desa dan kelurahan. Diperlukan rancangan sistem sosialisasi yang efektif kepada Babinsa agar supaya Babinsa mampu dikenal oleh setiap penduduk di desa atau kelurahan.

Babinsa diwajibkan untuk membuat buku catatan harian / buku saku yang berfungsi untuk mencatat semua kegiatan setiap harinya, diwajibkan menemui penduduk di setiap dusun / kampung setiap harinya, dan melakukan anjangsana ke semua tokoh masyarakat dengan bukti buku catatan / buku saku yang ditandatangani oleh warga / penduduk yang ditemui dan dikunjunginya. Selain itu, diperlukan juga foto sebagai dokumentasi dan bukti kepada atasannya / Danramilnya masing-masing.

¹⁰ Wiwin Aprianti, *Babinsa : Masalah, Prospek dan Masa Depan*, Jurnal Wijaya Kusama, Vol. III, No. 1, Tahun 2012, hal. 2

Babinsa didorong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nya masing-masing untuk lebih mengenal. Babinsa harus dikenal di tengah masyarakat dimana setiap warga desa harus mengetahui keberadaan Babinsa, manfaat Babinsa, tugas Babinsa, dan tujuan Babinsa di tengah masyarakat Desa. Babinsa dirancang untuk memberikan alamat, No HP dan bahkan memiliki media sosial sebagai sarana untuk sharing informasi, tukar pengalaman, pelaporan, pengaduan, maupun berbagai kepentingan administrasinya, khususnya sosialisasi kepada masyarakat oleh Babinsa tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dari ancaman aksi radikalisme melalui siskamling, poskamling, ronda keliling, dan kewaspadaan dini lainnya.

Kesimpulan

Di era globalisasi, dinamika keamanan mengalami perubahan dari ancaman militer menjadi ancaman non militer, dari ancaman keamanan tradisional menjadi ancaman keamanan non tradisional, dan dari *classic security issues* menjadi *modern security issues*. Ancaman radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme yang tercermin dalam ISIS dan sel-selnya di berbagai belahan dunia merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa.

Dalam mendeteksi, mencegah dan menangkal aksi radikalisme di tengah masyarakat, diperlukan Babinsa yang terdidik, terlatih dan kompeten. Sebagai bagian dari organisasi TNI AD, Babinsa merupakan ujung tombak dalam mencegah aksi, gerakan dan manuver radikalisme di tengah masyarakat desa dan kelurahan. Babinsa yang tergelar di setiap desa dan kelurahan baik di kota maupun di desa dituntut untuk mampu melakukan pulbaket dan belanja masalah di desa

/ kelurahan sehingga mampu menangkal aksi radikalisme.

Pemberdayaan Babinsa dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal aksi radikalisme di tengah masyarakat adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Babinsa harus diberdayakan baik dari aspek kuantitas dan kualitas personil, peningkatan alokasi anggaran, pemenuhan sarana prasarana, dan perbaikan piranti lunak / metode. Babinsa harus mampu berdaya, memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman radikalisme di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagyo, *Bela Negara : Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015
- Agus Subagyo, *Terorisme Global Abad 21*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015
- Herman Sasongko, *Peran Babinsa Dalam Menanggulangi Terorisme*, Tesis, Bogor : Unhan, 2014
- Ramses Salomoa, *Kebijakan Indonesia Dalam Mencegah Pergerakan ISIS*, Tesis, Cimahi : MIP FISIP Unjani, 2015
- Sumarjo Sukito, *ISIS : Sejarah, Aksi dan Deradikalisasi*, Jurnal Jipolis FISIP Unjani, Vol VI, No. 2 Tahun 2015
- Suranto, *Program Deradikalisasi Demi NKRI*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Suwarno Sutikno, *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2011
- Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016
- Wiwin Aprianti, *Babinsa : Masalah, Prospek dan Masa Depan*, Jurnal Wijaya Kusama, Vol. III, No. 1, Tahun 2012
- Yoki Naura, *Sistem dan Kebijakan Babinsa Di Era Reformasi*, Tesis, Bogor : Unhan, 2014

BIODATA PENULIS

Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si. lahir di Sukoharjo, 18 April 1978. Pria yang aktif sebagai Dosen dan menulis sejumlah buku seperti buku Bela Negara; Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi ini, memperoleh gelar Sarjana (S.I.P.) dalam Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000, kemudian meraih Gelar Magister (M.Si.) Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, dan meraih Gelar Doktor Ilmu Politik (Dr.) dari FISIPOL UGM pada tahun 2013.

Alumnus Universitas Gajah Mada tersebut pernah mengajar di sejumlah tempat seperti di FISIP Universitas Langlang Buana (2007–2009); Dosen Non Organik di Sesko TNI (2004–2007); Dosen Non Organik di Pusdikintel Polri (2008 – 2010); Dosen Non Organik di Seskoad (2003– Sekarang); Unhan Jakarta (2011-Sekarang) dan Pascasarjana FISIP Unswagati Cirebon (2015).